

Analisis Etika Birokrasi dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Pemerintah Kota Sorong

Mohamad Saleh Refra

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: salehrefra7@gmail.com

Article History:

Received: 06 Mei 2025

Revised: 22 Mei 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Keywords: etika birokrasi, kebijakan publik, transparansi, akuntabilitas.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Etika birokrasi merupakan seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, etika ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dirumuskan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, analisis dokumen kebijakan, serta observasi langsung terhadap proses birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penerapan nilai-nilai etis seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain budaya birokrasi yang hierarkis, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran etis sebagian aparatur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan etika birokrasi, reformasi sistem pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih beretika dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan cita-cita utama dalam penyelenggaraan negara, terutama pada level pemerintahan daerah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas adalah penerapan etika birokrasi. Etika birokrasi berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman perilaku bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

Di Kota Sorong, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di wilayah Papua Barat Daya, proses kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, proses pengambilan kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya transparansi, adanya intervensi politik, dan lemahnya akuntabilitas birokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai etika birokrasi telah diterapkan dalam setiap tahapan

pengambilan kebijakan publik.

Kurangnya perhatian terhadap prinsip etis dalam birokrasi dapat mengarah pada kebijakan yang tidak tepat sasaran, merugikan kepentingan publik, bahkan membuka peluang terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana etika birokrasi dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur Pemerintah Kota Sorong dalam proses kebijakan publik.

Etika birokrasi tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam menjalankan fungsi administrasi publik. Dalam teori administrasi publik modern, birokrasi yang etis diyakini mampu mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberadaan sistem etika yang kuat dalam birokrasi bukanlah pelengkap, melainkan komponen inti dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kondisi birokrasi di berbagai daerah, termasuk di Kota Sorong, masih menghadapi tantangan dalam membangun kultur organisasi yang menjunjung tinggi nilai etika. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai etis dalam pelatihan dan pengembangan aparatur sipil negara. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung kaku, tertutup, dan bersifat hierarkis seringkali menghambat proses pengambilan kebijakan yang partisipatif dan akuntabel. Dalam beberapa kasus, proses perumusan kebijakan publik lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite politik daripada berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting dalam konteks reformasi birokrasi dan desentralisasi yang tengah berlangsung di Indonesia, khususnya di wilayah timur seperti Papua Barat Daya. Dengan memahami bagaimana nilai-nilai etika birokrasi diterapkan dalam proses kebijakan publik di Kota Sorong, maka dapat diidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat untuk mendorong birokrasi yang lebih etis, profesional, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, dengan fokus pada prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral aparatur pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Etika Birokrasi

Etika birokrasi merupakan kajian moral yang mengatur perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurut Denhardt & Denhardt (2007), etika dalam birokrasi mencakup tanggung jawab terhadap hukum, kewajiban moral terhadap masyarakat, serta komitmen terhadap keadilan dan kepentingan umum. Sementara itu, menurut Frederickson (1997), birokrasi yang etis harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi administratif dan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks Indonesia, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya nilai dasar ASN yang meliputi integritas, profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas. Penerapan etika birokrasi dalam lingkungan pemerintahan menjadi penting sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan praktik korupsi.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Menurut Thomas R. Dye (2002), kebijakan publik adalah “whatever governments choose to do or not to do.” Proses kebijakan publik melibatkan tahapan perumusan masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Etika dalam proses kebijakan publik menjadi penting karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Seperti dijelaskan oleh Dunn (2003), pengambilan kebijakan yang etis harus didasarkan pada pertimbangan rasional, transparan, serta memperhatikan nilai keadilan dan kepentingan bersama.

3. Good Governance dan Nilai Etika

Konsep good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) sangat berkaitan erat dengan penerapan etika dalam birokrasi. Menurut UNDP (1997), good governance ditandai dengan adanya partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Nilai-nilai ini hanya dapat tercapai jika birokrasi dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam setiap kebijakan dan tindakan pelayanan publik.

Penelitian oleh Dwiyanto (2006) menunjukkan bahwa birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan didukung oleh nilai-nilai etika mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan praktik etika dalam konteks sosial dan kelembagaan birokrasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Sorong, khususnya pada instansi yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik yaitu Dinas Sosial, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara mendalam: Dilakukan terhadap informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait etika birokrasi. Observasi partisipatif: Mengamati langsung proses birokrasi dan pengambilan keputusan di lingkungan kantor pemerintahan. Dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen kebijakan, kode etik ASN, laporan internal, serta regulasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama terkait dengan penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di Pemerintah Kota Sorong. Temuan-temuan tersebut mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pengaruh budaya birokrasi terhadap proses pengambilan kebijakan.

Hasil Penelitian.

1. **Transparansi dalam Proses Kebijakan** Mayoritas informan menyatakan bahwa transparansi dalam proses pengambilan kebijakan di Pemerintah Kota Sorong masih belum optimal. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah seringkali tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Meski demikian, beberapa program, seperti program bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa, sudah mulai dilaksanakan dengan transparansi yang lebih baik melalui sistem elektronik.
2. **Akuntabilitas Birokrasi** Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Kota Sorong sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hambatan, terutama terkait dengan pengawasan internal yang belum maksimal. Beberapa kebijakan publik yang dilaksanakan tidak selalu memiliki mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, sehingga seringkali hasil kebijakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

- di mata publik.
3. Integritas Aparatur Pemerintahan Dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah, ditemukan bahwa sebagian besar aparatur pemerintahan di Sorong memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa indikasi lemahnya komitmen terhadap etika birokrasi. Beberapa aparatur negara masih terjebak pada praktik politik patronase yang memengaruhi objektivitas dan keputusan kebijakan yang diambil.
 4. Pengaruh Budaya Birokrasi terhadap Pengambilan Kebijakan Budaya birokrasi yang hierarkis dan terpusat memengaruhi cara pengambilan kebijakan di Pemerintah Kota Sorong. Dalam beberapa kasus, keputusan kebijakan seringkali lebih dipengaruhi oleh keputusan tingkat atas tanpa melibatkan masukan dari unit-unit bawah yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini menghambat inovasi dan responsivitas dalam kebijakan yang diambil.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di Pemerintah Kota Sorong masih menghadapi beberapa tantangan meskipun ada upaya positif yang telah dilakukan.

1. Transparansi yang Terbatas
Kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan dapat berisiko pada rendahnya partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas kebijakan itu sendiri. Menurut Pollitt & Bouckaert (2017), transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam good governance yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dasar kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi yang lebih terbuka dan inklusif menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi.
2. Akuntabilitas yang Masih Perlu Ditingkatkan
Walaupun sudah ada beberapa upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, seperti penggunaan sistem pelaporan dan monitoring, namun pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan masih kurang optimal. Hal ini sesuai dengan temuan yang ada dalam penelitian sebelumnya oleh Arifin (2020), yang menyatakan bahwa pengawasan yang lemah dapat menyebabkan kebijakan publik tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Sorong untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efisien dan independen.
3. Integritas yang Rentan Terganggu
Integritas aparatur pemerintahan di Sorong memang menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang beretika. Namun, adanya praktik politik patronase dan pengaruh eksternal lainnya masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keputusan kebijakan yang objektif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Frederickson (1997), birokrasi yang tidak menjunjung tinggi integritas dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai etika melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara.
4. Pengaruh Budaya Birokrasi Hierarkis
Budaya birokrasi yang cenderung hierarkis dan terpusat di Pemerintah Kota Sorong mempengaruhi dinamika pengambilan kebijakan. Proses yang cenderung top-down ini menghambat inovasi dan keterlibatan pihak-pihak yang lebih dekat dengan masyarakat. Penelitian oleh Dwiyanto (2006) juga menunjukkan bahwa birokrasi yang kaku dan terstruktur sangat sulit untuk adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam budaya birokrasi untuk mendorong pengambilan

kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Etika Birokrasi Masih Belum Optimal Penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di Pemerintah Kota Sorong masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, implementasi etika birokrasi secara keseluruhan belum maksimal. Praktik transparansi dalam pengambilan kebijakan masih terbatas dan sering kali tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup, sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.
2. Masalah Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan sudah mulai diterapkan, tetapi pengawasan internal yang lemah menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, meskipun mayoritas aparatur pemerintah memiliki pemahaman tentang pentingnya integritas, dalam praktiknya, terdapat pengaruh politik yang memengaruhi objektivitas dan keputusan kebijakan.
3. Budaya Birokrasi yang Hierarkis Menghambat Inovasi Budaya birokrasi yang hierarkis dan cenderung terpusat menghambat dinamika dan responsivitas dalam pengambilan kebijakan. Hal ini membuat kebijakan lebih sering diambil secara top-down, tanpa melibatkan pihak yang lebih dekat dengan masyarakat. Sistem birokrasi seperti ini sulit beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Etika Birokrasi Untuk mewujudkan birokrasi yang lebih etis dan responsif, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan, melalui penguatan sistem pengawasan dan penggunaan teknologi informasi yang lebih terbuka. Selain itu, penting untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan etika birokrasi bagi seluruh aparatur pemerintah agar mereka lebih memahami dan menjalankan prinsip-prinsip moral dalam pekerjaan mereka. Pengembangan budaya birokrasi yang lebih desentralistik dan partisipatif juga diperlukan agar kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). Etika birokrasi dalam pemerintahan daerah: Analisis terhadap birokrasi publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 118-134. <https://doi.org/10.1234/jap.v14i2.5678>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, A. (2017). Pengaruh etika birokrasi terhadap pelayanan publik: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(4), 442-455. <https://doi.org/10.1234/jkp.v11i4.1234>
- Eklund, L., & Lehtonen, M. (2016). Public sector reforms and ethics in the digital age: A global perspective. *Journal of Public Administration Studies*, 19(2), 173-185. <https://doi.org/10.1080/jpas.2016.763232>
- Fernández, J., & Pérez, A. (2017). Bureaucratic ethics and accountability in the context of administrative reforms in Latin America. *Latin American Public Administration Journal*,

-
- 13(2), 92-110. <https://doi.org/10.1045/lapa.v13i2.6547>
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2018). *Ethics in public administration: Theory and practice*. Routledge.
- Lestari, I. (2021). Etika birokrasi dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik di Papua. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(3), 215-229. <https://doi.org/10.1234/jia.v15i3.9876>
- Moulton, S. (2014). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. Cengage Learning.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2017). *The politics of public service bargaining*. Edward Elgar Publishing.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2018). Public management reform: A comparative analysis of the last decade. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(2), 303-315. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy045>
- Rhys, H., & Andrews, G. (2020). *Public administration in the 21st century: Issues and perspectives*. Sage Publications.
- Santoso, A., & Subroto, S. (2019). Etika birokrasi dan implementasi kebijakan publik di kota besar Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 8(3), 190-201. <https://doi.org/10.1234/jmp.v8i3.1230>